

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Sanusi. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pena Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ashsofah Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A Widanti. (2015). *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Azwar Azrul. (1996). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Bennita W Vaughans. (2013). *Keperawatan Dasar* (Edisi Terjemahan). Yogyakarta: Rapha Publishing.
- Fred Ameln. (1991). *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Haliman, Arif dan Ari Wulandari. (2012). *Cerdas Memiuh Rumah Sakit: Sebuah Komunikasi medical yang Jujur dan Harmonis*. Yogyakarta: Rapha Publishing.
- Hartono Soerjopratiknjo. (1982). *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*. Seksi Notariat FH UGM Yogyakarta.
- Herlambang, Susatyo dan Arita Murwani. (2012). *Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- J. Guwandi. (2007). *Dokter, Pasien, dan Hukum*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- J. Satrio. (2018). *Perwakilan Dan Kuasa*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Lumenta, Benyamin. (1989). *Hospital, Citra, Peran dan Fungsi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Kanisius
- Lutfi Effendi. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Administratif*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing Malang.
- Marbun. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

- Moegni Djojodirdjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir. (1997). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-10. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung
- Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Prajudi Atmosudirdjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Praptianingsih. (2006). *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suratman, Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo.
- Triwibowo, Cecep. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Jakarta : RajaGrafindo.
- Wila Chandrawila Supriadi. (2001). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta:Sinar Grafika.

## Repositori

Puput Fitria. *Pedoman Pengorganisasi Komite Keperawatan*. Lamongan: Rumah Sakit Muhammadiyah. <https://www.academia.edu>

Hadi Purnawan. (2017). *Diskresi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Pada Perawat di Kota Waringin Timur*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/52435/12/Naskah%20Publikasi.pdf>

Yessie Christianto. (2009). *Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*. Semarang : Pasca sarjana Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata. <http://repository.unika.ac.id/14173/>

## Jurnal

Ateng Syafrudin. (2000). “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV.*” Bandung: Universitas Parahyang.

Pieter E Latumeten. (2017). “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht Dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1 (Hal. 1-37). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di akses dari [https://www.researchgate.net/publication/318651666\\_REPOSISI\\_PEMBERIAN\\_KUASA\\_DALAM\\_KONSEP\\_VOLMACHT\\_DAN\\_LASTGEVING\\_BERDASARKAN\\_CITA\\_HUKUM\\_PANCASILA](https://www.researchgate.net/publication/318651666_REPOSISI_PEMBERIAN_KUASA_DALAM_KONSEP_VOLMACHT_DAN_LASTGEVING_BERDASARKAN_CITA_HUKUM_PANCASILA)

## Peraturan Perundang-undangan

RI. Undang-Undang Dasar 1945.

RI. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

RI. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

RI. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

RI. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

RI. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

RI. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- RI. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
- RI. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja RSUD Toto Kabila
- RI. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
- RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus
- RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.
- RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
- RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- RI. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 TAHUN 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
- RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan Di Bidang Kesehatan